



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

**LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)**

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EDY JUNAEDI**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **240107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 18.314.700.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 11980 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 359.400.000
4. Tanah Seluas 6520 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 195.600.000
5. Tanah Seluas 1990 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 59.700.000
6. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 6.500.000.000
7. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
8. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 635.000.000**

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 Tahun 2021, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.



620.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 195.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 19.172.700.000

III. HUTANG

Rp. 910.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 18.262.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.